

---

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA

Vivi Herlina  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh  
[viviherlina124@gmail.com](mailto:viviherlina124@gmail.com)

### *Ringkasan*

*Masyarakat saat ini menganggap banyak kinerja pemerintah desa yang belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Air Teluh yang berada Kecamatan Kumun Debai di Kota Sungai Penuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pemilihan para responden dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Desa Air Teluh. Instrumen penelitian adalah pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan observasi lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Korelasi Pearson Product Moment. Sedangkan operasionalisasi variabel menggunakan variabel bebas (X) yaitu Persepsi masyarakat. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kinerja. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan skor yang diperoleh sebesar 0,691. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Air Teluh dapat dikategorikan baik.*

**Kata Kunci:** *Kinerja; Pearson Product Moment; Pemerintah Desa; Persepsi*

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit kecil pemerintahan dalam pemerintahan Indonesia, melainkan lebih dari itu, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah ada, lama sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Terlepas dari bentuk dan berbagai sebutan bagi desa, dalam pelaksanaan semangat reformasi dan penegakan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan di daerah menyangkut pula dengan pemerintahan desa. Kemajuan dan pertumbuhan masyarakat yang cepat serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang bersifat dinamis dan dengan adanya birokrasi pemerintah, hal ini menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level bawah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat peka dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib dilayani (Wasistiono, 2002, p. 27). Aparatur harus selalu mampu secara mandiri dan juga secara organisasi untuk selalu meningkatkan profesionalisme yang berhubungan dengan tugas, serta tanggung jawabnya. Pada tingkatan inilah citra pemerintah dinilai oleh masyarakat.

Pelayanan yang prima dan berkualitas akan menciptakan kepuasan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan

---

masyarakat. Hal ini juga tergolong ukuran tingkat kinerja birokrasi pemerintahan. Isu peningkatan kualitas pelayanan (*public service*) menjadi isu penting dalam era pembangunan saat ini. Pelayanan publik menjadi isu utama yang menentukan keberhasilan setiap lembaga dalam memberikan pelayanan. Thoha (2006, p. 114) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu parameter untuk menilai kualitas administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baik buruknya administrasi publik dapat dilihat dari seberapa baik pelayanan publik, apakah sudah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kewenangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 dijelaskan “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan ada istiadat Desa”. Dalam Pasal 19, Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hal asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pemerintah Desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa. Sebagai contoh, pembuatan peraturan di desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan melakukan kerja sama antar desa; urusan pembangunan, antara lain melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar desa. Urusan kemasyarakatan, dilakukang dengan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Dalam rangka untuk mengembangkan organisasi pemerintah desa maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin di desa adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah desa supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengembangan organisasi pemerintah desa sangat diharapkan. Selain itu, hal ini tidak terlepas pula dari tanggung jawab Kepala

---

Desa sebagai pembina masyarakat demi terwujudnya Pemerintahan Desa yang baik.

Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan infrastruktur sosial yang memadai, seperti lingkungan yang layak, meningkatkan keterampilan warga, tersedianya fasilitas umum yang memadai, dan tercukupinya sarana transportasi. Penyediaan infrastruktur sosial tersebut harus dilakukan supaya desa dapat berkembang dan mampu menjalankan rumah tangganya sendiri untuk mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera dan damai. Maka strategi dan program pemerintahan Desa harus dapat memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan turut pula menikmati hasil kerja mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan dan kebijakan yang ada perlu dituangkan dalam yang lebih sederhana, serta dengan biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Banyak teori menjelaskan bahwa kesadaran dan juga partisipasi masyarakat desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Perlu pula untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa pentingnya kegiatan pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial, terutama dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan sangat tergantung pada kemampuan kepala desa selaku pemimpin di desa. Sebab pada tingkatan yang paling bawah, kepala desa selaku pimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan pembangunan di desa sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat desa untuk mau berperan serta dalam membangun desa. Sebagai pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki beban tugas yang tidak dapat dianggap ringan. Para aparatur desa sebagian besar tidak pernah mendapatkan pelatihan *public service* seperti para eksekutif di sebuah perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menjalankan empat fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai kepanjangan tangan birokrasi pemerintah dengan menyediakan pelayanan administratif untuk masyarakat desa.
2. Fungsi sosial yang bercampur aduk dengan fungsi pribadi, yaitu beranjangsana dengan warga masyarakat melalui silaturahmi. Anjangsana sosial adalah kearifan lokal yang mempunyai makna simbolik, mendekatkan pamong desa dengan rakyatnya.
3. Fungsi pembangunan seperti menggerakkan perencanaan dari bawah, merancang proposal yang disampaikan kepada pemerintah supra desa, mengalokasikan bantuan ke masyarakat serta memobilisasi dana dan tenaga masyarakat melalui gotong royong.

---

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, pemerintah terus melakukan pembaharuan di bidang pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terarah dan mempunyai dasar serta kepastian hukum, supaya dapat meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga aparat pemerintah desa bisa menunjang program pemerintah untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan profesional.

Desa Air Teluh adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kumun Debai, di Kota Sungai Penuh. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Air Teluh dilaksanakan oleh aparatur desa dengan jumlah 8 (delapan) orang yang terdiri atas seorang Kepala Desa dan beberapa perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan baik dan terarah bahkan menjadi maju apabila kinerja aparatur desa yang memberikan pelayanan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu formal yang mengakibatkan masyarakat merasa kepentingannya terlayani dengan baik dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Air Teluh perlu mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga Kepala Desa sebagai aparatur desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan informasi di atas, tentunya tidak menimbulkan persepsi yang merupakan fenomena di tengah masyarakat bahwa kinerja pemerintah desa:

1. Identik dengan pelayanan yang lamban, birokrasi yang tidak jelas dan berbelit belit.
2. Pembagian tugas (*job description*) yang jelas, penunjukan aparat yang “asal ada” tanpa memperhatikan faktor pendidikan, kompetensi dan kemampuan kerja.
3. Pemerintah desa masih bersifat pasif hanya menunggu tanpa ada usaha-usaha menggali potensi desa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa.
4. Kepala Desa pada umumnya berkantor di rumah kediamannya walaupun sudah memiliki kantor desa sehingga peralatan (barang-barang inventaris desa) akan langsung jadi perabotan rumah pribadi kepala desa,
5. Persoalan Administrasi yang masih belum tertib dan setumpuk permasalahan lainnya.
6. Produktivitas yang rendah, dalam hal kualitas dan kuantitas layanan yang diterima masyarakat.
7. Kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
8. Pelaksanaan pekerjaan (tata kerja) yang menyimpang dari prosedur kerja yang telah ditentukan.

---

9. Kebijakan dan kegiatan sektor publik yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan ini, perlu dirujuk pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Supaya diketahui apakah penelitian ini memiliki pengaruh dan sekaligus mendukung penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian oleh Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul” menjelaskan bahwa persepsi warga masyarakat tentang kinerja aparat pemerintah desa dalam hal kesederhanaan aparat desa dalam memberikan pelayanan publik, dipersepsikan belum sepenuhnya memberikan pelayanan secara jelas dan masih ada warga yang merasakan atau menganggap ada pelayanan yang berbelit-belit. Ketepatan waktu aparat desa dalam memberikan pelayanan publik terhadap warga, pada umumnya dipersepsikan sesuai dengan prosedur dan prinsip pelayanan publik, khususnya mengenai ketepatan waktu, namun masih ada satu atau dua aparat desa kadang terlambat dalam kedatangan maupun dalam pelayanan administratif. Tanggung jawab aparat desa dalam memberikan pelayanan publik, dipersepsikan bahwa aparat desa sudah secara konsekuen atau bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada warga. Dan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan aparat desa dalam memberikan pelayanan publik, dipersepsikan masih terdapat sebagian kecil aparat desa yang kurang ramah dan kurang sopan. Ketegasan kedisiplinan dan cara berbicara yang keras terhadap warga yang membutuhkan pelayanan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Zulihar Mukmin, Ruslan, Siti Kurniati dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode wawancara. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi aparat desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan sudah baik. Pandangan masyarakat di Desa Suak Ribee terhadap kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pembangunan dari segi kualitas sudah memenuhi harapan masyarakat namun dari segi kuantitas belum maksimal (Mukmin, Ruslan and Kurniati, 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ali Sahbana dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal” menjelaskan bahwa pembangunan rabat beton usaha tani di Desa

---

Muara Botung diterima oleh masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian diperoleh  $r_{hitung}$  sebesar 0,793, sementara  $r_{tabel}$  dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh pada tabel “r” Product Moment nilai sebesar 0,294. Maka  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu  $0,793 > 0,294$ , yang berarti bahwa korelasi antara variabel x (pembangunan rabat beton) dengan variabel y (persepsi masyarakat) adalah signifikan. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap pembangunan rabat beton usaha tani di Desa Muara Botung cukup baik (Sahbana, 2017).

Terdapat pula penelitian oleh Vivi Herlina yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci” menjelaskan bahwa salah indikator keberhasilan pemerintah adalah terlaksananya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel, yaitu variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Dari hasil penelitiannya diperoleh informasi bahwa masyarakat telah ikut terlibat dalam proses pembangunan fisik sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan hanya saja masih banyak masyarakat yang enggan untuk ikut berpartisipasi karena mereka tidak mengerti akan pentingnya keterlibatan mereka dan teknik atau metode dalam pelaksanaan pembangunan fisik tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan pelatihan, pendidikan dan stimulasi kegiatan yang berkelanjutan (Herlina, 2017).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah sebenarnya persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Air Teluh di Kecamatan Kumun Debai”.

Adapun tujuan dari penelitian ini, dengan berpijak pada permasalahan yang dihadapi adalah untuk mengetahui: Bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dengan lokasi penelitian di Desa Air Teluh, Kec. Kumun Debai yang berada di Kota Sungai Penuh.

Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin *percipare* yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003, p. 445). Selanjutnya Walgito menjelaskan persepsi adalah proses yang dilalui oleh sebuah stimulus yang selanjutnya diterima panca indera lalu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga seseorang menyadari yang diinderanya itu (Walgito, 2002, p. 69). Senada pula dengan Atkinson dan Hilgard yang menjelaskan bahwa

---

persepsi adalah proses seseorang menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungannya. Sebagai sebuah bentuk cara pandang, persepsi muncul karena adanya respon terhadap sebuah stimulus (Atkinson, 1991, p. 209).

Sedangkan persepsi menurut Jalaluddin (2005, p. 51) ialah pengalaman tentang sebuah objek, peristiwa, atau bahkan hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya pengertian persepsi dikemukakan oleh Robbins (2003, p. 97) yang menguraikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera kemudian dianalisa, dan diinterpretasi yang kemudian dilakukan evaluasi sehingga individu tersebut mendapatkan makna. Pendapat Robbins tersebut melengkapi pendapat-pendapat sebelumnya, yaitu adanya unsur-unsur evaluasi atau penilaian terhadap obyek persepsi.

Pengertian Persepsi menurut Walgito dan Robbins di atas tidak saling bertentangan. Dari kedua sumber tersebut terdapat kesamaan, yaitu:

1. Persepsi merupakan sebuah ataupun gambaran suatu obyek di luar diri individu itu sendiri.
2. Proses terjadinya persepsi dimulai melalui indra.

Dari berbagai pendapat di atas peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa persepsi adalah sudut pandang seseorang yang diperoleh dari proses identifikasi panca indera terhadap suatu objek/permasalahan kemudian diinterpretasikan disampaikan berdasarkan apa yang diperoleh dari panca indera tersebut, proses menginterpretasikan tersebut biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan tingkat pendidikan seseorang.

Menurut Mahsun (2006, p. 25), kinerja (*performance*) merupakan gambaran tentang pencapaian sebuah kegiatan atau program untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planing*) suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui apabila individu atau organisasi telah memiliki kriteria atau indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dapat berupa tujuan-tujuan, atau target yang hendak dicapai oleh organisasi. Tanpa tujuan atau target maka kinerja sebuah organisasi akan sulit diketahui karena tidak ada parameternya. Sedangkan Widodo (dalam Pasolong, 2008, p. 175) menjelaskan bahwa kinerja berarti melakukan sebuah kegiatan selanjutnya menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Nasucha (2004, p. 107) mendefinisikan kinerja organisasi sebagai efektifitas untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang ditetapkan oleh setiap kelompok melalui usaha

---

sistematik serta meningkatkan kemampuan organisasi secara berkelanjutan untuk mencapai kebutuhannya efektif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu pembahasan dengan penjelasan dan menggunakan statistik sederhana yang memerlukan kemampuan berteori dan berasumsi. Menurut Sugiyono (2003, p. 11) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai sebuah variabel mandiri, baik terdapat satu variabel atau bahkan lebih (*independen*) dengan tidak membuat perbandingan, atau menghubungkannya dengan variabel-variabel lain. Dengan demikian dapat pula diartikan sebagai proses pemecahan masalah (*problem solving*) dengan melukiskan keadaan subjek dan juga objek penelitian untuk saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada tampak atau bagaimana adanya.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Teluh-Kecamatan Kumun Debai. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sesuai dengan jumlah sampel yaitu 40 (empat puluh) orang. Pemilihan responden ditentukan dengan *purposive sampling*. Deskriptif kuantitatif diperlukan guna memberi gambaran hasil penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat korelasi variabel itu sendiri maka diperlukan pembuktian analisa yang dilakukan terhadap hasil angket yang telah disebar.

Untuk memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel maka perlu dibuat operasionalisasi variabel. Adapun operasionalisasi variabel dari penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*independent variabel*) atau diistilahkan Variabel X. Adapun Variabel X pada penelitian ini yaitu Persepsi masyarakat.
2. Variabel tidak bebas atau terikat (*dependent variabel*) atau yang diistilahkan Variabel Y. Adapun yang menjadi variabel Y adalah Kinerja.

Menurut Walgito (2002, pp. 54–55), persepsi memiliki indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan terhadap rangsang dari luar individu
2. Pengertian atau pemahaman
3. Penilaian atau evaluasi

Dwiyanto (dalam Nasucha, 2004, p. 119), menyebutkan empat parameter atau indikator dalam menilai kinerja organisasi publik sebagai berikut:

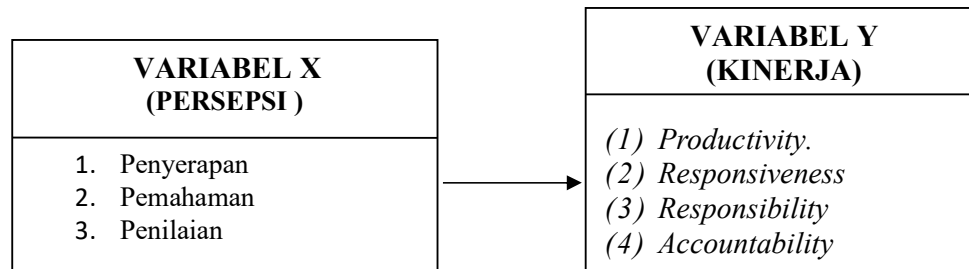
1. *Productivity* (produktivitas).
2. *Responsiveness* (responsivitas)



3. *Responsibility* (responsibilitas)
4. *Accountability* (akuntabilitas)

Dari teori di atas dapat disimpulkan kerangka berpikir seperti gambar 1:

**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir**



Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi atau pandangan individu atau sekelompok individu tentang suatu gejala atau fenomena. Skala likert yang digunakan menggunakan ketentuan skor sebagai berikut:

1. Sangat Baik : di beri skor = 5
2. Baik : di beri skor = 4
3. Cukup Baik : di beri skor = 3
4. Tidak Baik : di beri skor = 2
5. Sangat tidak Baik : di beri skor = 1

Sedangkan untuk melihat sejauh mana hubungan variabel independen dan variabel dependen menggunakan **Korelasi *Pearson Product Moment* (PPM)**.

Rumus yang digunakan:

$$r_{\text{hitung}} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((\sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2))}}$$

Keterangan:

$r_{\text{hitung}}$  = Koefesien Korelasi

$\sum X$  = Jumlah skor item

$\sum Y$  = Jumlah skor total ( seluruh item)

$n$  = Jumlah responden

Namun untuk penghitungannya peneliti menggunakan alat bantu program SPSS Versi 20.

## HASIL PENELITIAN

Hasil perhitungan pada seluruh indikator yang ditujukan kepada 40 orang responden dengan penyebaran angket yang memiliki 6 (enam) item pertanyaan pada Variabel Persepsi (X) dan 12 (dua belas) item pertanyaan pada Variabel Kinerja (Y). Selanjutnya dilakukan proses

untuk menentukan nilai korelasi menggunakan metode *Pearson Product Moment* (PPM) yang dalam hal ini menggunakan *software* SPSS Versi 20 untuk melakukan perhitungan. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel 1:

**Tabel 1**  
**Persamaan Korelasi Pearson Product Moment (PPM) Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai**

		Correlations	
		Persepsi	Kinerja
Persepsi	Pearson Correlation	1	,691**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	40	40
Kinerja	Pearson Correlation	,691**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	40	40

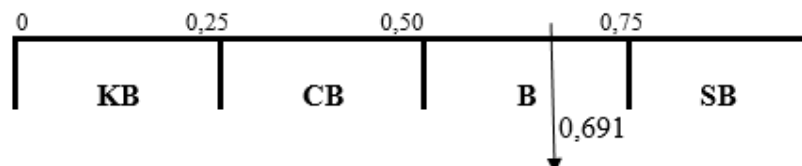
\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai  $r$  (Koefisien Korelasi) antara Persepsi dan Kinerja adalah 0,691. Analisis yang dilakukan dari hasil penelitian melalui penyebaran angket menunjukkan bahwa berdasarkan skor yang didapatkan berada pada interval 0,51 sampai dengan 0,75 yaitu sebesar **0,691**.

Kemudian untuk membaca atau menjelaskan hasil tersebut, dapat menggunakan skala garis kontinum yang digambarkan sebagai berikut:

- 0 s/d 0,25 = Kurang Baik
- 0,26 s/d 0,50 = Cukup Baik
- 0,51 s/d 0,75 = Baik
- 0,76 s/d 1,00 = Sangat Baik

**Gambar 2**  
**Skala Garis Kontinum**



Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa korelasi antara persepsi dengan kinerja dikategorikan baik.

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil perhitungan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan

---

Pemerintahan Desa, Studi Kasus di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai berada pada angka 0,691 yang artinya persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai adalah Baik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson (1991) *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Herlina, V. (2017) 'Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Kasus di Desa Pungut Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci)', *Jurnal Ipteks Terapan*, 11(3), p. 220. doi: 10.22216/jit.2017.v11i3.2069.
- Mahsun, M. (2006) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. 1st edn. Yogyakarta: BPFE.
- Mukmin, Z., Ruslan and Kurniati, S. (2016) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat', *JIPPK*, 3, pp. 106–111.
- Nasucha, C. (2004) *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pasolong, H. (2008) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rakhmat, J. (2005) *Psikologi Komunikasi*. 2nd edn. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robbins, S. P. (2003) *Perilaku Organisasi*. 10th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahbana, A. (2017) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 2(1), pp.40–45.
- Sobur, A. (2003) *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono (2003) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito (2002) *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- Wasistiono, S. (2002) *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999*. Bandung: Alqaprint.